

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI KINERJA KEPALA DESA DALAM
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAH DESA SIMPANG PADANG
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Nadyatul Jannah
NPM. 157110069**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

**PEKANBARU
2021**

PERSEMBAHAN

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.

Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran doa kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta.

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hampasan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku

Oleh:

Nadyatul Jannah

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab proposal ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWt, dan penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah banyak membantu dalam Penelitian ini diantaranya adalah:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL bersama jajarannya yang telah menyediakan dan memberikan kesempatan

- pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliaupimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas yang beliau pimpin.
 3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta membagi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
 4. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ayahnda **Enandri** yang penulis banggakan dan ibunda tercinta **Sasnawati**, adek tercinta **Febi Febri Yanti** yang suport selama penyelesaian skripsi serta seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun secara materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dapat terselesaikan

7. Kepada uwo tercinta Hj. Nelfita yang telah memberikan doa dan dukungan selama penyelesaian skripsi
8. Ucapan terimakasih penulis kepada sahabat Liza, Cindy, Saibu Dinar, Sakinah yang selalu menemani bimbingan skripsi yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta motivasi sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wabillahitaufikwalhidayah, WassalamualaikumWr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

Nadyatul Jannah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
SURAT PERNYATAAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan.....	13
1. Konsep Administrasi.....	13
2. Konsep Administrasi Publik.....	17
3. Konsep Organisasi.....	17
4. Konsep Manajemen.....	22
5. Manajemen Sumber Daya Manusia	24
6. Konsep Kebijakan	25

7. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	26
8. Evaluasi	29
B. Kerangka Pikiran	35
C. Hipotesis	37
D. Konsep Operasional	37
E. Operasional Variabel	39
F. Teknik Pengukuran	41
BAB III : METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Teknik Penarikan Sampel	45
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	48
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	49
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	50
A. Kabupaten Bengkalis	50
1. Pemerintahan	50
2. Geografi	51
3. Demografi	52
B. Kecamatan Bathin Solapan	54
1. Profil Kecamatan	54
2. Demografi	55
3. Pemerintahan	55
C. Desa Simpang Padang	47
1. Pemerintah	47
2. Demografi	58
3. Struktur Organisasi	60

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Identitas Responden	64
1. Usia.....	64
2. Jenis Kelamin	65
3. Pendidikan.....	65
B. Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	66
1. Pengembangan.....	67
2. Pemberian Reward	70
3. Motivasi.....	73
4. Perencanaan SDM	76
5. Kompensasi	79
6. Komunikasi	82
C. Pembahasan.....	86
BAB V : PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	95
DAFTAR KEPUSTAKAAN	96
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I. 1. Jumlah Pelayanan di Kantor Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019	8
II.1 Operasional Variabel tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	39
III.1 Populasi dan sampel Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Kepemimpinan Kepala Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	45
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	49
IV.1. Pembagian Administratif dan Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis	52
IV. 2 Jumlah Desa Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan, 2018.....	52
IV. 3 Jumlah Warga dan Keluarga Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan, 2018	53
IV.4. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bathin Solapan	55
IV. 5 Jumlah Dusun, RW, dan RT Menurut Desa di Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019	56
IV. 6 Perangkat Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019	58
IV. 7 Perangkat Badan Permusyawaratan Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019	58
IV. 8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019.....	59
IV. 9 Jumlah Penduduk Menurut Rumah Tangga Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019	59

V.1	Usia Responden Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	64
V.2	Karakteristik Responden Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	65
V.3	Pendidikan Responden Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	66
V.4	Tanggapan Responden tentang Indikator Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	68
V.5	Tanggapan Responden tentang Indikator Pemberian Reward Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	70
V.6	Tanggapan Responden tentang Indikator Motivasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	73
V.7	Pembinaan Pemerintahan desa kepada perangkat desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020	75
V.8	Tanggapan Responden tentang Indikator Perencanaan SDM Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	76
V.9	Tanggapan Responden tentang Indikator Kompensasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	79

V.10	Tanggapan Responden tentang Indikator Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	82
V.11	Jadwal Kegiatan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	84
V.12	Rekapitulasi tanggapan responden tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	86
V.13	Data Sekunder Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	88
V.14	Jadwal Kegiatan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka pikiran tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	36
IV. 1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Daftar Pertanyaan Kuisisioner / Angket Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	99
2 Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	106
3 Telly Sebaran Kuesioner Tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	112
4 Daftar Data Sekunder Tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	117
5 Hasil Wawancara Tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	120
6 Dokumentasi Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	127
7 Surat Penetapan Dosen Pembimbing	134
8 Surat Rekomendasi Riset Universitas Islam Riau.....	135
9 Surat Rekomendasi Riset Provinsi Riau.....	136
10 Surat Rekomendasi Riset Kabupaten Bengkalis	137
11 Surat Rekomendasi Riset Desa Simpang Padang Kabupaten Bengkalis	138
12 Surat Keterangan Plagiasi	139
13 Daftar Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	140

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadyatul Jannah
NPM : 157110069
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwasanya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, Juni 2021
Pelaku Pernyataan,

Nadyatul Jannah

Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Nadyatul Jannah
NPM. 157110069

ABSTRAK

KATA KUNCI: Evaluasi Kinerja, Kepala Desa, dan Pemerintah Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan faktor hambatan apa saja yang mempengaruhi evaluasi kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa simpang padang kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Pengembangan, Pemberian Reward, Motivasi, Perencanaan SDM, Kompensasi, dan Komunikasi. Tipe penelitian yang berlokasi di kantor Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah penelitian kuantitatif. Data angka berasal dari hasil kuesioner dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sampling jenuh dan teknik *purposive sampling*. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil sebaran kuesioner dan wawancara penelitian. Kemudian data sekunder berupa buku-buku literature dan internet sesuai data yang diperlukan. Pada analisis data disajikan dalam bentuk uraian tulisan, yang mana akan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa pada kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dari segi evaluasi pada tanggapan responden cukup baik dengan tanggapan responden sebanyak 47 dengan persentase 51.09%

Performance Evaluation of Village Heads Organizing Simpang Padang Village Government, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency

Nadyatul Jannah
NPM. 157110069

ABSTRACT

KEYWORDS: *Performance Evaluation, Village Head, and Village Government*

This study aims to determine how the evaluation of the performance of the village head in administering the government and what obstacle factors affect the evaluation of the performance of the village head in administering the village administration of Simpang Padang, Inner Solapan District, Bengkalis Regency. The assessment indicators used include Development, Reward, Motivation, HR Planning, Compensation, and Communication. This type of research which is located in the Simpang Padang Village office, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency is quantitative research. The numerical data comes from the results of questionnaires and interviews. The sampling technique used in this study was saturated sampling and purposive sampling technique. The research data comes from primary data obtained through the distribution of questionnaires and research interviews. Then secondary data in the form of literature books and the internet according to the required data. In data analysis, it is presented in the form of a written description, which will be analyzed using descriptive or elaboration methods. Based on research conducted on the Performance Evaluation of the Village Head in Organizing the Village Government of Simpang Padang, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency, it is known that the performance of the village head in administering the Simpang Padang Village government, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency in terms of evaluation on the respondent's response is quite good with 47 respondents with a proportion of 51.09%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Presthus yang dikutip Syafei (2003: 31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam hal ini administrasi merupakan faktor yang paling penting bagi suatu organisasi dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Maju mundurnya suatu perusahaan, tergantung pada baik tidaknya system administrasi yang dilaksanakan. Apabila administrasi dalam organisasi tersebut dilakukan dengan baik, maka usaha untuk tercapai tujuannya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja, serta menghabiskan waktu dan juga biaya yang banyak.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu disebut Administrasi. Keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan

itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Syafiie, 2003:5).

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa ciri pokok administrasi terdiri dari sekelompok orang. Administrasi tidak akan berjalan tanpa adanya sekelompok orang. Tidak hanya sekelompok orang saja yang dibutuhkan, namun kerja sama sangat dibutuhkan yang dilakukan dalam dua orang atau lebih. Ciri administrasi yang lain yaitu pembagian kerja dimana kegiatan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas. Sedangkan kegiatan yang runtut dalam suatu proses yaitu kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan. Ciri pokok dari administrasi yang lain yaitu tujuan, dimana sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Dalam organisasi Negara terdapat lembaga-lembaga Negara yang salah satunya adalah lembaga kepresidenan. Sebagai mana menurut UUD 1945 pasal 4 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah pada tingkat nasional, dalam melakukan kewajiban presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Guna mengatur bagaimana unsur-unsur organisasi mampu mencapai tujuan organisasi dengan maksimal maka di perlukan cara yang di kenal administrasi. Syafri (2012; 11) Administrasi ialah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Karena kerjasama tersebut harus ada wadahnya, yaitu organisasi, batasan lengkap tentang administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama

sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Organisasi secara statis merupakan suatu wadah atau tempat dimana aktivitas administrasi berlangsung. Artinya organisasi merupakan pusat untuk menjalankan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih. Sedangkan organisasi secara dinamis merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan secara bersamaan.

Susunan organisasi pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Organisasi menurut Siagian (2003;6) ialah setiap bentuk persekuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian

upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki permasalahan atas penyelenggaraan pemerintah adalah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data yang penulis himpun diketahui bahwa pada Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis memiliki SOP sebagai berikut:

**Standar Operasi Prosedur Pelayanan
di Kantor Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten
Bengkalis**

I. Waktu Pelayanan

Hari : Senin-Kamis
Jum'at
Pukul : 08.00-12.00 Wib
08.00-16.00 Wib

II. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan						
No	Pelayanan		Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya
1	Pelayanan Kartu Keluarga	Surat Pengantar KK Baru	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. KK (Asli) 3. KTP (Asli) 4. Surat Pindah Datang (Pendatang) 5. Foto kopi surat nikah 6. Foto kopi surat kelahiran (Sesuai kebutuhan)	1. RT dan RW 2. Desa 3. Kecamatan 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Hari	Gratis
2		Surat Pengantar Perubahan data KK	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. KK Asli 3. Foto kopi Ijazah 4. Foto kopi Surat Nikah 5. Foto kopi Akta Kelahiran	1. RT dan RW 2. Desa 3. Kecamatan	5 Hari	Gratis
3	Pelayanan	Surat	1. Surat Pengantar RT	1. RT dan RW	5 Hari	Gratis

	Kartu Tanda Penduduk	Pengantar Pembuatan KTP-El	dan RW 2. Foto kopi KK 3. Foto kopi KTP 4. Surat Nikah (jika sudah menikah)	2. Desa 3. Kecamatan (Perekaman KTP-el) 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pencetakan KTP-el)		
4		Surat Pengantar Pembuatan KTP karena hilang atau rusak	1. Pengantar RT dan Rw 2. Fotokopi KK 3. Surat Kehilangan KTP-el dari Polsek 4. KTP Asli (Rusak)	1. RT dan RW 2. Desa 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Hari	Gratis
5	Pelayanan Surat Pindah	Surat Pengantar Surat Pindah Antar Desa dalam Satu Kecamatan	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. KK Asli 3. KTP Asli 4. Foto 3x4 (5 Lembar) 5. Foto kopi KK (5 Lembar) 6. Foto kopi Surat Nikah/Surat Cerai (5 Lembar) (dilegalisir pejabat yang berwenang)	1. RT dan RW 2. Desa	5 Hari	Gratis
6		Surat Pengantar Surat Pindah Kecamatan dalam Satu Kabupaten/ Kota	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. KK Asli 3. KTP Asli 4. Foto 3x4 (5 Lembar) 5. Fotokopi KK (5 Lembar) 6. Fotokopi Surat Nikah/ Surat Cerai (5 Lembar) (dilegalisir pejabat yang berwenang)	1. RT dan RW 2. Desa 3. Kecamatan	5 Hari	Gratis
7		Surat Pengantar Surat Pindah	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. KK Asli 3. KTP Asli	1. 2. RT dan RW 3. Desa 4. Kecamatan 5. Kabupaten	5 Hari	Gratis

		antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi	4. Foto 3x4 (6 Lembar) 5. Fotokopi KK (6 Lembar) 6. Fotokopi Surat Nikah/ Surat Cerai (6 Lembar) (dilegalisir pejabat yang berwenang)			
8	Pelayanan Akta Kelahiran	Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. Fotokopi KTP Kedua Orang Tua 3. Fotokopi KK Surat Kelahiran dari bidan/dokter/rumah sakit (asli) 4. Fotokopi surat nikah orang tua (dilegalisir oleh pejabat berwenang)	1. RT dan RW 2. Desa 3. Kecamatan 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Hari	Gratis
9	Pelayanan Surat Kematian	Surat Pengantar Pembuatan Surat Kelahiran/Akta Kelahiran	1. Surat Pengantar RT dan RW	1. RT dan RW	5 Hari	Gratis
10		Surat Pengantar Pembuatan Surat Kematian	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. KK Asli (yang meninggal terdapat dalam KK) 3. Keterangan Ahli Waris	1. RT dan RW 2. Desa	5 Hari	Gratis
11	Pelayanan Surat Keterangan Lain	Surat Pengantar Pengajuan Perizinan	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. Beserta Surat-surat lain 3. Fotokopi KTP 4. Fotokopi KK	1. RT dan RW 2. Desa	5 Hari	Gratis
12		Surat Pengantar Pembuatan SKU (Surat	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. KK Fotokopi 3. KTP Fotokopi	1. RT dan RW 2. Desa	5 Hari	Gratis

		Keterangan Usaha)				
13		Surat Pengantar Pembuatan SIUP dan NPWP	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. KTP Asli/Foto kopi	1. RT dan RW 2. Desa 3. Kantor Pajak	5 Hari	Gratis
14		Surat Pengantar Pembuatan Surat Izin Kerja	1. Surat Pengantar RT dan RW	1. RT dan RW 2. Desa	5 Hari	Gratis
15		Surat Pengantar Pembuatan SKCK	1. Surat Pengantar RT/RW 2. Fotokopi KTP 3. Fotokopi KK 4. Pas foto 3X4 (2 lembar) 5. Surat pengantar dari desa	1. RT dan RW 2. Desa 3. Kantor Kepolisian	5 Hari	Gratis
16		Surat Pengantar Pembuatan Surat Nikah	1. Surat Pengantar RT dan RW 2. Foto kopi KTP (4 lembar) 3. Foto kopi KK (4 lembar) 4. Foto kopi Ijazah (4 lembar) 5. Pas Foto - 2x3 (4 lembar) - 3x4 (4 lembar) 6. Surat Pengantar dari Desa	1. RT dan RW 2. Desa	5 Hari	Gratis

Sumber : Kantor Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan data yang dihimpun penulis diketahui jumlah pelayanan di Kantor Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I. 1. Jumlah Pelayanan di Kantor Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan yang di Terima	Pelayanan Selesai Sesuai SOP	Pelayanan Selesai Tidak Sesuai SOP	Waktu
1	2	3	4	5	6
1	Surat pengantar surat nikah	147	27	37	5 Hari
2	Surat pengantar pembuatan KK	165	14	34	5 Hari
3	Surat pengantar pembuatan KTP	179	19	44	
4	Surat pengantar pembuatan permohonan pengurusan akte kelahiran	125	28	47	5 Hari
5	Surat pengantar pembuatan permohonan pengurusan kematian	130	21	36	5 Hari
6	Surat pengantar pembuatan keterangan tidak mampu (SKTM) sekolah	139	19	24	5 Hari
7	Surat pengantar pembuatan keterangan domisili usaha	144	12	34	5 Hari
8	Surat pengantar pembuatan keterangan ahli waris	130	17	45	5 hari
Jumlah		1159	437	722	

Sumber : Kantor Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa banyak urusan pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP yang ada ada dari segi waktu penyelesaian. Dalam hal ini pelayanan di dominasi oleh Surat pengantar pembuatan KTP sebanyak 179 pelayanan sedangkan pelayanan paling sedikit adalah pelayanan Surat pengantar

pembuatan permohonan pengurusan kematian dan Surat pengantar pembuatan keterangan ahli waris yang masing-masing hanya 130 pelayanan yang masuk.

Untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan warganya. Pembinaan administrasi desa adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka menyempurnakan dan memperbaiki penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa agar berjalan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan mencapai tujuan (Hanif Nurcholis, 2011: 154).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Inonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3) Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa :

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis menemukan fenomena yang terjadi pada Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang di temukan oleh penulis :

1. Setiap urusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah desa sering memakan waktu yang lama seperti saat masyarakat ingin mengurus surat pengantar KTP maupun KK.
2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa belum memadai seperti ruang tunggu yang kurang memadai dan kurang nya jumlah tempat duduk sehingga menyulitkan warga yang akan mendapatkan pelayanan.
3. Ketiadaan petugas yang menyebabkan masyarakat harus menunggu dan bahkan penyelenggaraan dilakukan oleh pegawai yang lain.

4. Berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan di kantor Desa Simpang Padang seperti pegawai tidak tepat waktu datang ke kantor, sering tidak berada di tempat saat jam pelayanan, hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam kepengurusan.
5. Adanya respon pegawai yang tidak tanggap dengan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan dan belum mengerti mengenai prosedur pelayanan. sikap tidak tanggap sangat mengganggu kualitas pelayanan yang di rasakan oleh masyarakat yang datang dan ingin mendapatkan pelayanan yang baik.

Berdasarkan pemaparan di latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan Judul Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :
“Bagaimana Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor hambatan apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Kegunaan Akademis: Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan bidang ilmu Kepemimpinan.
- a. Kegunaan Praktis : Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa Simpang Padang Khusus Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintah desanya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Istilah administrasi berhubungan erat dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang dalam menjalankan kegiatan dan rutinitas kehidupan sehari-hari. Kegiatan administrasi yang teratur dan sistematis akan melahirkan keadaan organisasi yang sehat dan dinamis.

Menurut Lih. Waldo (dalam Faried, 2015: 187) administrasi adalah kerja sama manusia yang didasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan secara bersama (sesuatu yang sekedar ada dalam pemikiran).

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafri (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Begitu sempitnya penafsiran tentang administrasi pada zaman dahulu. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu ini terus berkembang dan memiliki banyak penafsiran dikalangan para ahli. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008;2), Administrasi didefinisikan sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Dimock dan Dimock (dalam Pasalong 2014; 3) Administrasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Oleh karena administrasi merupakan kegiatan yang mutlak ada dalam setiap organisasi, maka dalam pencapaian tujuannya haruslah terdapat unsur-unsur yang mengiringi. Setiap unsur tersebut membentuk suatu persatuan yang disebut dengan sistem.

Adapun dimensi unsur-unsur administrasi menurut Pasalong (2014; 3) ada tiga yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi, Fayol (dalam Zulkifli. 2005;71) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian dan wewenang
- c. Disiplin

- d. Kesatuan perintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan
- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
- g. Pengupahan atau penggajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hierarki
- j. Tata tertib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa atau inisiatif
- n. Solidaritas sekelompok kerja

Selain dari prinsip-prinsip umum administrasi perlu kita pahami bahwasanya terdapat unsur-unsur adminisrasi. Menurut Syafri (2012;11) unsur-unsur administrasi itu memiliki 8 bagian yaitu:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Komunikasi
- d. Kepegawaian
- e. Keuangan
- f. Perbekalan
- g. Tata usaha
- h. Hubungan masyarakat

Menurut The Liang Gie mendefenisikan Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu (dalam Zulkifli 2014:14). Pekerjaan pokok yang dimaksudkan mencakup unsur-unsur umumadministrasi dalam perspektif proses. Adapun unsur-unsur umumadministrasi tersebut meliputi :

- a. Organisasi (tatakeragaan)
- b. Manajemen (tatapimpinan)
- c. Komunikasi (tatahubungan)
- d. Informasi (tataketerangan)
- e. Personalia (tatakepegawaian)
- f. Finansia (tatakeuangan)
- g. Matera (tatapembekalan)
- h. Relasi publik (tatahumas)

Pelaksanaan administrasi yang baik akan menentukan keberhasilan suatu Negara. untuk menjalankan dan menentukan kualitas administrasi yang dijalankan oleh negara tergantung kepada sumber daya manusia yang dimilikinya. Kumpulan sumber daya tersebut membentuk suatu kesatuan yang dinamakan sebagai organisasi.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam suatu administrasi ada terdapat proses kerja sama nasional serta memiliki unsur-unsur antara lain adalah : manusia, tujuan tugas, serta sarana dan prasaran. Dimana kerja sama tersebut melibatkan

beberapa unsur penting guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2. Konsep Administrasi Publik

Dimoock dan Dimock (dalam Pasolong 2016;20) juga mengatakan bahwa administrasi publik merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga, mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa, disusun kemudian dikendalikan.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie 2010;25) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Sedangkan menurut George J. Gordon (dalam Syafiie 2010;25) administrasi publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif dan yudikatif.

3. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan organisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan. (dalam Yussa Tarmizi dan Hendry Andry 2015:14)

Menurut Robbins dan Judge (dalam Feriyanto dan Endang shyta Triana 2015:7) Organisasi merupakan suatu unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih, dikoordinasi secara sadar, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulkifli. 2009;71)

Jadi, organisasi merupakan persekutuan 2 orang atau lebih yang terikat dalam rangka mencapai tujuan bersama menjalankan serangkaian aktivitas dimana dalam mencapai tujuan tersebut terdapat pembagian kerjadan sumber daya organisasi.

Aspek dari organisasi yang dikemukakan oleh Weber (dalam Thoha, 2011;166) ialah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama mempunyai unsur-unsur *Properties* sebagai berikut:

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*bounderies*). Dengan demikian, seseorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi, mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.

- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari fungsi ini ialah terdapatnya hierarki. Konsekuensi dari adanya hierarki ini ialah bahwa didalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staff.

Organisasi sebagai wadah dan rangkaian hierarki tentunya harus memiliki prinsip-prinsip yang mampu mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sehingga, didalam organisasi yang mengacu pada dua pandangan ini, maka dibutuhkan prinsip-prinsip yang dapat membangun organisasi.

Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Menurut Siswanto (2005;98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Organisasi dan Tujuan

Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan.

Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi

b. Esensi Organisasi

Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.

c. Tanggung Jawab dan Otoritas

Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka

d. Spesialisasi untuk Efisiensi

Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

e. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer

Sementara itu, selain dari prinsip yang dikemukakan oleh Siswanto (2005;98) tersebut, Menurut Siagian (2008;97), terdapat dua belas prinsip

organisasi yang dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Adapun prinsip-prinsip itu ialah:

- a. Terdapat tujuan yang jelas
- b. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi
- c. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
- d. Adanya kesatuan arah (*unity of direction*)
- e. Adanya kesatuan perintah (*unity of command*)
- f. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang)
- g. Adanya pembagian tugas
- h. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
- i. Pola dasar organisasi harus relatif
- j. Adanya jaminan jabatan
- k. Imbalan yang diberikan pada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan

Dari beberapa definisi dan penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, maka hal itu dapat membuktikan bahwa dewasa ini masyarakat dimanapun berada tidak lepas dari praktik-praktik organisasi dalam kehidupannya. Dilingkungan masyarakat, baik itu organisasi formal maupun informal selalau ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain yang merupakan bentuk organisasi secara hierarki. Organisasi yang baik adalah organisasi yang secara bersama-sama mampu mewujudkan tujuan bersama dan menerapkan prinsip dasar secara seimbang dalam kehidupannya.

4. Konsep Manajemen

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Menurut Manulang (1999;4) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

G.R Terry dalam (Marnis. 2011;3) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Menurut Henry Fayol (Safroni, 2012;47), fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) pengarahan (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*). Sedangkan menurut Ricki W. Griffin fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*controlling*).

Dari perbandingan beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (*Planning*) karena perencanaan yang akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah perencanaan adalah pengorganisasian (*organizing*). Hampir semua ahli menempatkan pengorganisasian diposisi kedua setelah perencanaan. Pengorganisasian merupakan pembagian kerja dan sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan karena pengorganisasian pun harus direncanakan.

Adanya penambahan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*) setelah fungsi pengarahan. Fungsi pengkoordinasian untuk mengatur karyawan agar dapat saling bekerjasama sehingga terhindar dari kekacauan, percekocokan dan kekosongan pekerjaan. Selanjutnya fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*).

Dari beberapa konsep, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan akumulatif kemampuan dan keterampilan mengembangkan pendekatan dan strategi untuk membangun semangat kerja dengan cara memberikan motivasi agar para personil senang akan kerjasama sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan semula dapat tercapai.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dijelaskan oleh Simamora (dalam Sutrisno, 2014;5) ialah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.

Menurut Dessler (dalam Sutrisno, 2014;5) manajemen Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian.

Sedangkan Umar (dalam Sutrisno, 2014;7), menjelaskan manajemen Sumber Daya Manusia menurut tugasnya dapat dikelompokkan atas tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi Manajerial: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian
- b. Fungsi Operasional: Pengadaan, Pengembangan, Kompensasi, Pengintegrasian, Pemeliharaan, dan Pemutusan hubungan kerja

- c. Fungsi ketiga ialah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Menurut Simamora (dalam Sutrisno 2014:5) Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja

6. Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijakan seringkali disamakan pengertiannya dengan policy. Hal tersebut sering kali di karenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* kedalam bahas Indonesia.

Menurut Anderson (dalam Nurcholis, 2007;263) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, menurut Irfan Ismaly faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

- a. Adanya pengaruh-pengaruh tekanan luar
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama
- c. Adanya pengaruh sifat pribadi
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
- e. Adanya pengaruh dimasa lalu (Islamy, 2002;25)

Thomas R. Dye (dalam Nurcholis, 2007: 264) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Irfan Islamy mengemukakan (dalam Winarno. 2002;36) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan tertentu.

7. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menurut Syafi'I (2011;97) adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk daerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah desa menurut Widjaja (2003;3) merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan Desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran

strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangun pemerintah.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggarannya ditujukan kepada desa. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Awang (2010) pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, dan melindungi berbagai aspek kehidupan.

Pemerintahan desa menurut Saparin (2009;19) menyatakan bahwa pemerintahan desa ialah simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakatnya.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraann urusan pemerintahan oleh

pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3) Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa :

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

8. Evaluasi

Evaluasi kinerja disebut juga “*Performance evaluation*” atau “*Performance appraisal*”. *Appraisal* berasal dari kata Latin “*appratiare*” yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai orang lain. Leon C. Mengginso mengemukakan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah “penilaian prestasi kerja (*Performance appraisal*), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.” (Mangkunegara, 2005:10).

Evaluasi kinerja yang dikemukakan Payaman J. Simanjuntak adalah “suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.” (Simanjuntak, 2005:103). Berdasarkan pengertian tersebut maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses yang

digunakan oleh pimpinan untuk menentukan prestasi kerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya menurut tugas dan tanggung jawabnya.

Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan Wirawan (2009: 24) sebagai berikut:

- a. Memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika merekrut pegawai (ternilai), aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan memenuhi standar kinerja.
- b. Alat promosi dan demosi. Hampir disemua sistem evaluasi kinerja, hasil evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pemberian promosi. Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau komisi, kenaikan pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kinerja aparatur ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, instansi menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat atau jabatan aparatur ternilai.
- c. Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat baik, atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi aparatur agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja baik atau sedang.

- d. Penentuan dan pengukuran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang menggunakan prinsip manajemen *by objectives*, evaluasi kinerja dimulai dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal tahun.
- e. Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur mampu memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin karena ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Bagi aparatur seperti ini penilai akan memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan mengupayakan peningkatan kinerja ditahun mendatang. Konseliang dapat dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambanan aparatur.
- f. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karier. Evaluasi kinera menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan sebagai ukuran untuk meningkatkan kariernya

Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengavaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi, adapun tujuan dari evaluasi kinerja menurut (Ivancevich, 1992) antara lain:

a. Pengembangan

Dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu dtraining dan membantu evaluasi hasil training. Dan juga dapat membantu pelaksanaan Conseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.

Dari hasil pengamatan di ketahui bahwa tidak ada pengembangan yang mencolok karena hanya mengikuti alur pekerjaan yang sudah ada dari kepala desa terdahulu namun saat pandemi covid-19 memang ada perubahan yang terjadi yaitu adanya layanan dengan standar kesehatan misalkan dengan adanya tempat cuci tangan dan adanya pengecekan suhu kepada masyarakat yang datang ke kantor desa.

b. Pemberian Reward

Dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif dan promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk membarhentikan pegawai.

Pemberian reward pada Desa Simpang Padang juga dalam bentuk bonus jika staff kantor Desa Simpang Padang mengemban suatu jabatan pada sebuah proyek atau kegiatan sebagaimana Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis berikut:

Pasal 6

- a. Kepala Desa sebagai penguasa pengelolaan keuangan desa dan sebagai pengguna anggaran desa mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1.500.000,00
- b. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai PTPKD mendapat tunjangan sebagai berikut:
 1. Koordinator Rp 1.000.000,00
 2. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Rp 750.000,00
 3. Bendahara Desa Rp 1.250.000,00

Pasal 7

Tunjangan rapat dengan ketentuan untuk pembuatan 1 (satu) peraturan desa paling banyak:

1. Ketua Rp 750.000,00
2. Wakil Ketua Rp 650.000,00
3. Anggota Rp 450.000,00

c. Motivasi

Dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggungjawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.

bentuk motivasi yang diberikan kepala desa kepada para pegawainya dalam menunjang pelayanan baik adalah dengan memberikan iming-iming insentif dan reward. Dalam hal ini dilakukan untuk memberikan semangat kerja dan penyeleaikan kerja yang baik dan lebih cepat.

d. Perencanaan SDM

Dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan SDM.

jika masyarakat ingin menjadi salah satu perangkat desa Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

maka harus memenuhi kriteria yang telah di tentukan diantaranya adalah memiliki kemampuan mengoperasikan computer. Sementara jika tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian dibidang komputer pengujian khusus oleh tim penjurangan dan penyaringan oleh pihak desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

e. Kompensasi

Dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil.

adanya keengganan dari kepala desa untuk menaikkan gaji pegawainya meskipun telah dilakukan pengajuan kenaikan gaji dalam menunjang pemberian semangat kepada pegawai. Namum disisi lain kepala desa lebih memilih memberikan insentif setiap adanya proyek yang dilakukan di desa Simpang Padang yang mereka memberi istilah dengan “upah capek”. Sehingga inilah bentuk kompensasi lain yang diberikan kepada pegawai guna memberikan semangat agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat

f. Komunikasi

Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. (Darma 2009 :14)

adanya hal menarik dari pelayanan di kantor desa Simpang Padang yaitu adanya gagasan oleh kepala desa dalam membuat grup media sosial yang dalam hal ini adalah *WhatsApp* yang terdiri dari kepala desa dan pegawai serta grup *WhatsApp* yang terdiri dari Kepala Desa, Pegawai kantor desa dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) guna memberikan kedekatan secara emosional dan percepatan penyebaran informasi dan juga mencegah adanya ketidaktrasparansi kebijakan yang ada di Desa Simpang Padang

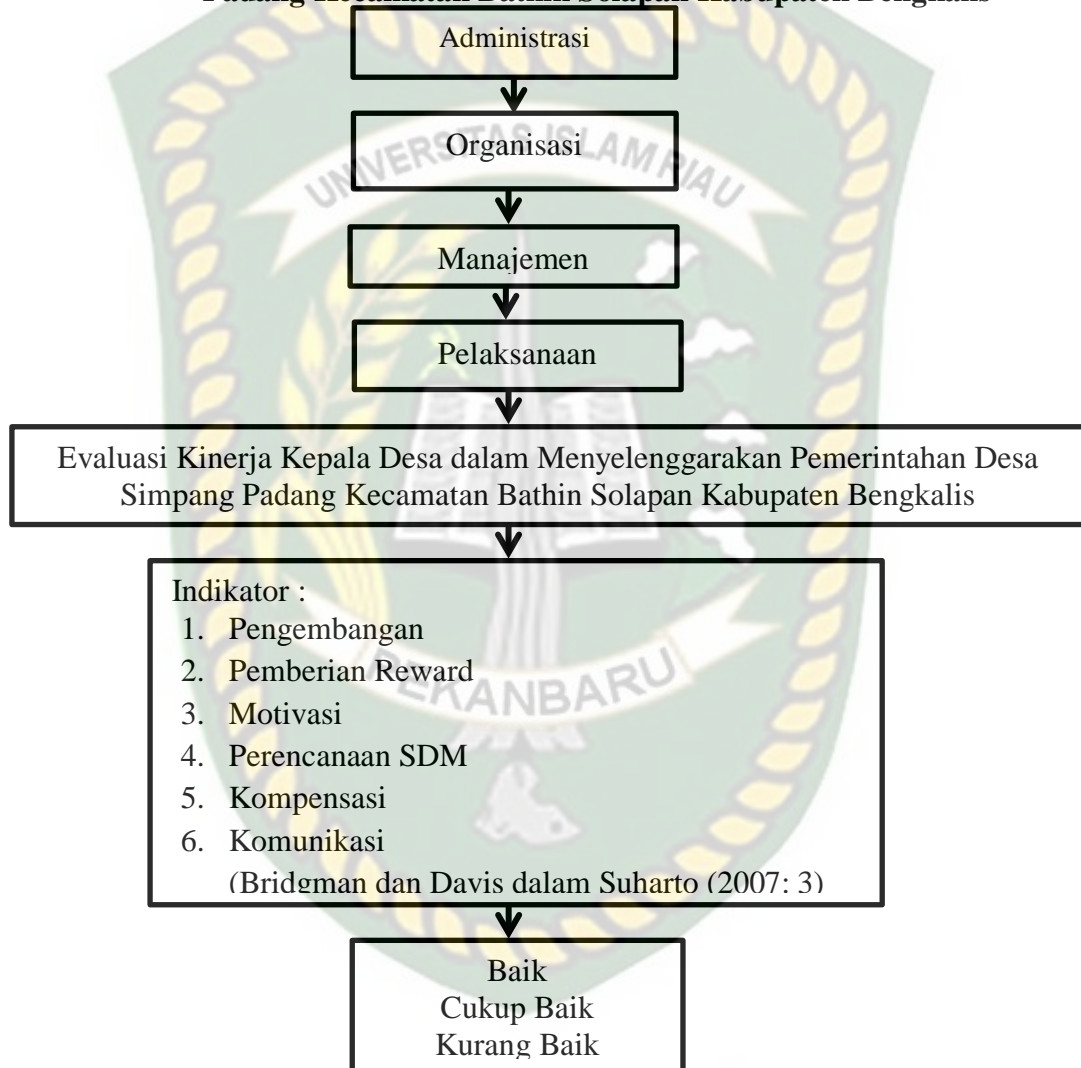
Berdasarkan pendapat di atas, sistem evaluasi kinerja sebagaimana yang dikembangkan di atas sangat membantu sebuah manajemen kerja baik instansi pemerintah maupun swasta untuk memperbaiki kinerja pegawai yang kurang maksimal, tujuan evaluasi kinerja ini untuk membangun semangat kerja para pegawai dan mempertahankan kinerja yang baik dan memperbaiki komunikasi kerja.

B. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dari judul Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan

Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis secara rinci dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar II.1: Kerangka pikiran tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis



Sumber:Modifikasi Penulis,2019

C. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat di tarik hipotesis bahwa diduga kurangnya Baiknya Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

D. Konsep Operasional

1. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisis dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan konsep operasional sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.
- b. Administrasi publik adalah suatu proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengpelaksanaankan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
- c. Organisasi adalah setiap bentuk persekuuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan

yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

- d. Manajemen adalah proses-proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan Pengembangan, Pemberian Reward, Motivasi, Perencanaan SDM, Kompensasi.
- e. Komunikasi dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran manajemen yang telah ditetapkan semula.
- f. Manajemen Sumber Daya Manusia ialah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja.
- g. Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu.
- h. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan
- i. Kinerja adalah segala hasil capaian dari segala bentuk tindakan dan kebijakan dalam rangkaian usaha kerja pada jangka waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan

- j. Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengavaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi, adapun tujuan dari evaluasi kinerja
- k. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desatertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
- l. Desa adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan kelurahan.
- m. Pemerintah Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1: Operasional Variabel tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi kinerja suatu metode dan proses penilaian	Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan	1. Pengembangan	1. Pengembangan yang dibuat kepala desa untuk Desa Simpang Padang 2. Bentuk perkembangan yang dibuat kepala desa	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik

pelaksanaa n tugas (<i>performan ce</i>) seseorang atau sekelompo k orang atau unit- unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. (Simanjunt ak, 2005:103).	Pemerintaha n Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis		untuk kemajuan Desa Simpang Padang	
		2. Pemberian Reward	1. Kenaikan gaji, insentif dan promosi yang diberikan kepala desa kepada pegawai Desa Simpang Padang 2. Syarat untuk mendapatkan kenaikan gaji, insentif dan promosi di Desa Simpang Padang	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		3. Motivasi	1. Motivasi yang diberikan kepala desa kepada pegawai Desa Simpang Padang 2. Bentuk motivasi dari kepala desa kepada pegawai Desa Simpang Padang	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		4. Perencanaan SDM	1. Bentuk kebijakan kepala desa terhadap sumber daya manusia yang ada di kantor Desa Simpang Padang 2. Keadaan sumber daya manusia kantor Desa Simpang Padang	1. 2. Baik 3. Cukup Baik 4. Kurang Baik
		5. Kompensasi	1. Kesesuaian kompensasi dengan kinerja di kantor Desa Simpang Padang 2. Bentuk kompensasi dari Desa Simpang Padang	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik
		6. Komunikasi	1. Bentuk komunikasi kepada pegawainya dan masyarakat 2. Bentuk komunikasi yang dibangun di Desa Simpang Padang	1. Baik 2. Cukup Baik 3. Kurang Baik

Sumber : Darma 2009 :14,

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Baik, cukup Baik dan kurang Baik.

Pengukuran yang digunakan ini adalah dengan menggunakan teknik persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 67-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 34-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 0-33%

Adapun indikator yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengembangan

Baik : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Baik : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

2. Pemberian Reward

Baik : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua kategori Indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Baik : Apabila semua kategori Indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

3. Motivasi

Baik : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua kategori Indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Baik : Apabila semua kategori Indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

4. Perencanaan SDM

Baik : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua kategori Indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Baik : Apabila semua kategori Indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

5. Kompensasi

Baik : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua kategori Indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Baik : Apabila semua kategori Indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

6. Komunikasi

Baik : Apabila semua kategori indikator berada pada ukuran lebih besar dari 67% jawaban responden

Cukup Baik : Apabila semua kategori Indikator berada pada ukuran 34 % - 66% jawaban responden

Kurang Baik : Apabila semua kategori Indikator berada pada ukuran lebih kecil dari 33% jawaban responden

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif adalah data yang dibuat dalam bentuk data dan tabel-tabel dengan mengumpulkan data yang akan mewakili populasi, kemudian dijelaskan tabel-tabel tersebut secara analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan yang terjadi sehingga akan diperoleh penggambaran yang jelas dan detail terhadap objek penelitian dari hasil analisa.

Menurut Sugiyono metode kuantitatif digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu system pemikiran, atau kelas peristiwa pada waktu tertentu. Melalui metode ini akan diperoleh data

dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral.

Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, dengan berusaha mendekati dan menyampaikan fakta-fakta yang jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak yang detail yang tidak penting.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin

Solapan Kabupaten Bengkalis karena penulis ingin mengetahui Menyelenggarakan Pemerintah Desa Simpang Padang di Kecamatan Bathin Solapan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan.

Tabel III.1 Populasi dan sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Kepemimpinan Kepala Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	(%)
1	Kepala Desa Simpang Padang	1	1	100
2	Sekretaris Desa Simpang Padang	1	1	100
3	Masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat	1159	92	-
Jumlah		1161	94	-

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini merupakan penelitian sampel bukan penelitian populasi karena menurut Sugiyono (2011:68) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Dalam penelitian ini yaitu Kepala Kepala Desa Simpang Padang, Sekretaris Desa Simpang Padang menggunakan teknik sensus karena jumlahnya sedikit sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Sedangkan terhadap masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menentukan sampel yang berkaitan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dikarenakan jumlahnya yang banyak dan tidak bisa dijumpai secara keseluruhan sehingga penulis dengan jumlah sampel sebanyak 100 sampel yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan :

N = Ukuran populasi

n = Ukuran sampel

d^2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90 %)

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian adalah:

POPULASI =	1159
d =	0.10
Sampel =	$\frac{1159}{1159 \cdot 0.1^2 + 1}$
	$\frac{1159}{1159 \cdot 0.01 + 1}$
	$\frac{1159}{11.59 + 1}$
	$\frac{1159}{12.59}$
Sampel =	92.06
=	92

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diambil atau data yang diperoleh langsung dari responden yang meliputi data yang berkenaan dengan Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini di peroleh secara tidak langsung dari beberapa sumber yang sudah diolah baik dalam bentuk literature yang berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik yaitu :

1. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis pada responden. Dalam penelitian ini, responden yang diberikan kuisisioner adalah masyarakat Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Pertanyaan yang diberikan melalui kuisisioner berkaitan langsung dengan indikator variabel penelitian.

2. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada informen untuk mendapatkan informasi berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti mengenai dengan Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
3. Observasi (pengamatan langsung) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, guna mengetahui bagaimana dengan Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
4. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistic deskriptif. Menurut Sugiyono (2012;147) statistik deskriptif adalah statik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan untuk umum atau general.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis seperti yang tertera pada rincian penggunaan waktu perkegiatan di tabel berikut ini:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke-																				
		2018				2019				2020				2021								
		Desember				Ja-Des				Jan-Des				Jan-Mar				Apr-Jun				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisisioner																					
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survey Lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																					
11	Revisi Skripsi																					
12	Penggandaan Skripsi																					

Sumber: Pedoman Penulisan UP FISIPOL-UIR, 2021



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Bengkalis

1. Pemerintahan

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tahun 2017 terjadi pemekaran kecamatan di Kabupaten Bengkalis, sehingga jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi sebanyak 11 kecamatan. Sebelumnya Seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari 102 desa/kelurahan pada tahun 2013. Pada tahun 2014, telah aktif 52 desa baru hasil pemekaran sehingga jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis menjadi 154 desa/kelurahan, sementara pada tahun 2015 menjadi 155 desa/kelurahan.

Visi Kabupaten Bengkalis sebagai tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 –2021 adalah

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju Dan Makmur Di Indonesia”

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021, maka dapat dicapai melalui 3 (tiga) misi yaitu:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
- b. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemamuran rakyat.
- c. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

2. Geografi

Berdasarkan data Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2019 diketahui bahwa Secara astronomis, Kabupaten Bengkalis terletak antara $2^{\circ}7'37,2''$ - $0^{\circ}55'33,6''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}57'57,6''$ - $102^{\circ}30'25,2''$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas: Utara–Selat Malaka; Selatan–Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti; Barat –Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai; Timur –Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Bengkalis memiliki batas batas antara lain:

Utara : Selat Melaka;

Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti;

Barat : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai;

Timur : Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 Kecamatan dengan luas masing-masing sebagai berikut:

Tabel IV.1. Pembagian Administratif dan Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (Km ²)
1	2	3	4
1	Mandau	Air Jamban	1.256,47
2	Pinggir	Pinggir	1.925,90
3	Bathin Solapan	Sebangar	...
4	Talang Muandau	Beringin	...
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	1.946,41
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	858,87
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	...
8	Rupat	Batu Panjang	1.079,87
9	Rupat Utara	Tanjung Medang	424,59
10	Bengkalis	Bengkalis Kota	464,59
11	Bantan	Selat Baru	446,28
Kabupaten Bengkalis			8.403,28

Sumber: Kabupaten Bengkalis dalam angka, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kecamatan terluas pada Kabupaten Bengkalis adalah kecamatan Bukit Batu sedangkan kecamatan dengan luas yang kecil adalah kecamatan Rupat Utara.

3. Demografi

Tabel IV.2. Jumlah Desa Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan, 2018

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa
1	2	3	4
1	Mandau	Air Jamban	11
2	Pinggir	Pinggir	10
3	Bathin Solapan	Sebangar	13

4	Talang Muandau	Beringin	9
5	Bukit Batu	Sungai Pakning	10
6	Siak Kecil	Lubuk Muda	17
7	Bandar Laksamana	Tenggayun	7
8	Rupat	Batu Panjang	16
9	Rupat Utara	Tanjung Medang	8
10	Bengkalis	Bengkalis Kota	31
11	Bantan	Selat Baru	23
Kabupaten Bengkalis			155

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah desa terbanyak pada kabupaten Bengkalis adalah pada kecamatan Bengkalis sebanyak 31 desa. Sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit pada kecamatan Bandar Laksamana.

Tabel IV.3. Jumlah Warga dan Keluarga Kabupaten Bengkalis Menurut Kecamatan, 2018

No	Kecamatan	Jumlah Warga			Jumlah Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4		
1	Mandau	76.683	72.830	149.513	41.757
2	Pinggir	30.442	28.496	58.938	17.757
3	Bathin Solapan	44.616	42.044	86.660	24.210
4	Talang Muandau	11.237	10.245	21.482	6.493
5	Bukit Batu	10.299	9.987	20.286	6.146
6	Siak Kecil	12.286	11.710	23.996	7.328
7	Bandar Laksamana	7.317	6.906	14.223	4.126
8	Rupat	16.496	15.447	31.943	9.804
9	Rupat Utara	6.387	6.054	12.441	3.943
10	Bengkalis	41.861	40.455	82.316	24.447
11	Bantan	21.836	20.510	42.346	13.026
Kabupaten Bengkalis		279.460	264.684	544.144	159.037

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terbanyak adalah pada kecamatan Bengkalis dengan jumlah

keluarga sebanyak 24.447 sedangkan kecamatan dengan jumlah keluarga sedikit adalah pada kecamatan Rupat Utara sebanyak 3.943 keluarga.

B. Kecamatan Bathin Solapan

1. Profil Kecamatan

Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Oleh karena itu, Kantor Camat Bathin Solapan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa / kelurahan.

Kecamatan Bathin Solapan beribu kota di Desa Sebangar dengan pusat pemerintahannya berada di Jalan Raya Duri-Dumai Km 19 RT. 01 RW 08.

2. Demografi

Kecamatan Bathin Solapan terdiri dari beberapa desa yang luas wilayah terbesar terletak di desa Bumbang sebagaimana data berikut:

Tabel IV.4 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bathin Solapan

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Buluh Manis	67,00	8,85
2	Petani	80,00	10,56
3	Tambusai Batang Dui	10,00	1,32
4	Simpang Padang	25,47	3,36
5	Pematang Obo	20,00	2,64
6	Balai Makam	45,00	5,94
7	Air Kulim	60,00	7,92
8	Boncah Mahang	83,53	11,03
9	Sebangar	66,47	8,78
10	Pamesi	76,00	10,03
11	Bumbang	104,00	13,73
12	Kesumbo Ampai	100,00	13,20
13	Bhatin Sobanga	20,00	2,64
Kabupaten Bengkalis		757,47	100,00

Sumber: Kecamatan Bhatin Solapan Dalam Angka 2019

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa desa terluas di kecamatan Bhatin Solapan adalah desa Bumbang dengan luas 104,00 km² sedangkan desa dengan luas paling kecil adalah desa Tambusai Batang Dui dengan luas 10,00 km²

3. Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan

Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Kecamatan Bathin Solapan merupakan salah kecamatan di kabupaten Bengkalis yang memiliki cukup banyak desa sebagaimana informasi yang diberikan oleh tabel berikut:

Tabel IV. 5 Jumlah Dusun, RW, dan RT Menurut Desa di Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019

No	Desa	Dusun	RW	RT
1	2	3	4	5
1	Buluh Manis	3	7	27
2	Petani	4	12	45
3	Tambusai Batang Dui	3	5	46

4	Simpang Padang	2	6	34
5	Pematang Obo	3	8	27
6	Balai Makam	4	9	45
7	Air Kulim	3	11	41
8	Boncah Mahang	3	5	28
9	Sebangar	4	9	28
10	Pamesi	3	5	17
11	Bumbung	5	5	20
12	Kesumbo Ampai	3	7	17
13	Bathin Sobanga	2	4	15
	Jumlah	42	93	370

C. Desa Simpang Padang

1. Pemerintah

Dasar hukum Desa Simpang Padang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 Pembentukan Desa Tambusai Batang Dui, Desa Simpang Padang, Desa Pematang Obo, Desa Air Kulim, Desa Buluh Manis, Desa Bathin Betuah, Desa Boncah Mahang, Desa Pamesi dan Desa Bathin Sobanga Kecamatan Mandau.

Desa Simpang Padang berdasarkan Rancangann Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simpang Padang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa Simpang Padang terdiri dari beberapa perangkat sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 6 Perangkat Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019

No	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kepala Urusan	3
4	Kepala Seksi	3
5	Kepala Dusun	4
Jumlah		12

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2019

Sementara perangkat dalam Badan Permusyawaratan Desa Simpang Padang terdiri dari beberapa perangkat sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 7 Perangkat Badan Permusyawaratan Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019

No	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Ketua BPD	1
2	Wakil Ketua	1
3	Sekretaris	1
4	Anggota BPD	6
Jumlah		9

Sumber: Kabupaten Bengkalis Dalam Angka 2019

2. Demografi

Desa Simpang Padang merupakan salah satu desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Bathin Solapan yang terdiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 1159 jiwa. Desa Simpang Padang memiliki perangkat desa sebanyak 9 orang sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel IV. 8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3
1	Laki-laki	725
2	Perempuan	688
Jumlah		1.413

Sumber: Kecamatan Bathin Solapan Dalam Angka, 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa Desa Simpang Padang memiliki jumlah penduduk sebesar 1.413 orang jiwa dengan luas areal tanah sebesar 38.41 km². Hal mengindikasikan potensi terbesar berasal dari lak-laki dengan jumlah sebesar 725 orang jiwa.

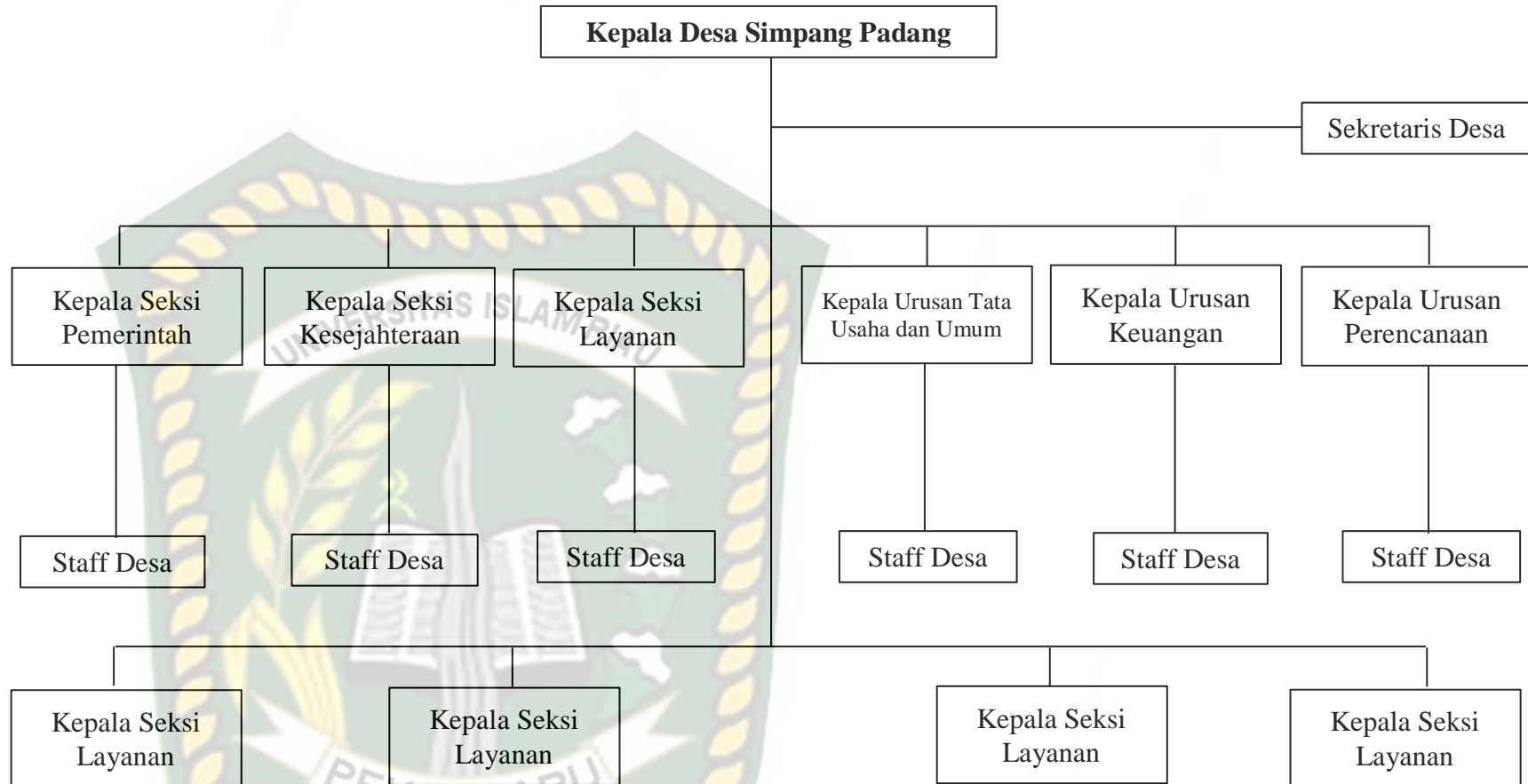
Tabel IV. 9 Jumlah Penduduk Menurut Rumah Tangga Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019

Desa	Penduduk Rumah Tangga	Rumah Tangga	Rata-Rata Jiwa Perumah Tangga
1	2	3	4
Merangin	1.413	342	4

Sumber: Kecamatan Bathin Solapan Dalam Angka, 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa Desa Simpang Padang memiliki jumlah yang banyak untuk ukuran sebuah Desa dengan rata-rata 4 orang jiwa untuk setiap rumah tangganya.

D. Struktur Organisasi



Gambar IV.1
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan tahun 2019

Pasal 6

Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa :

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
 - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

- a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa
- b. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintah
- c. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris desa mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
 - 2) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
 - 3) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

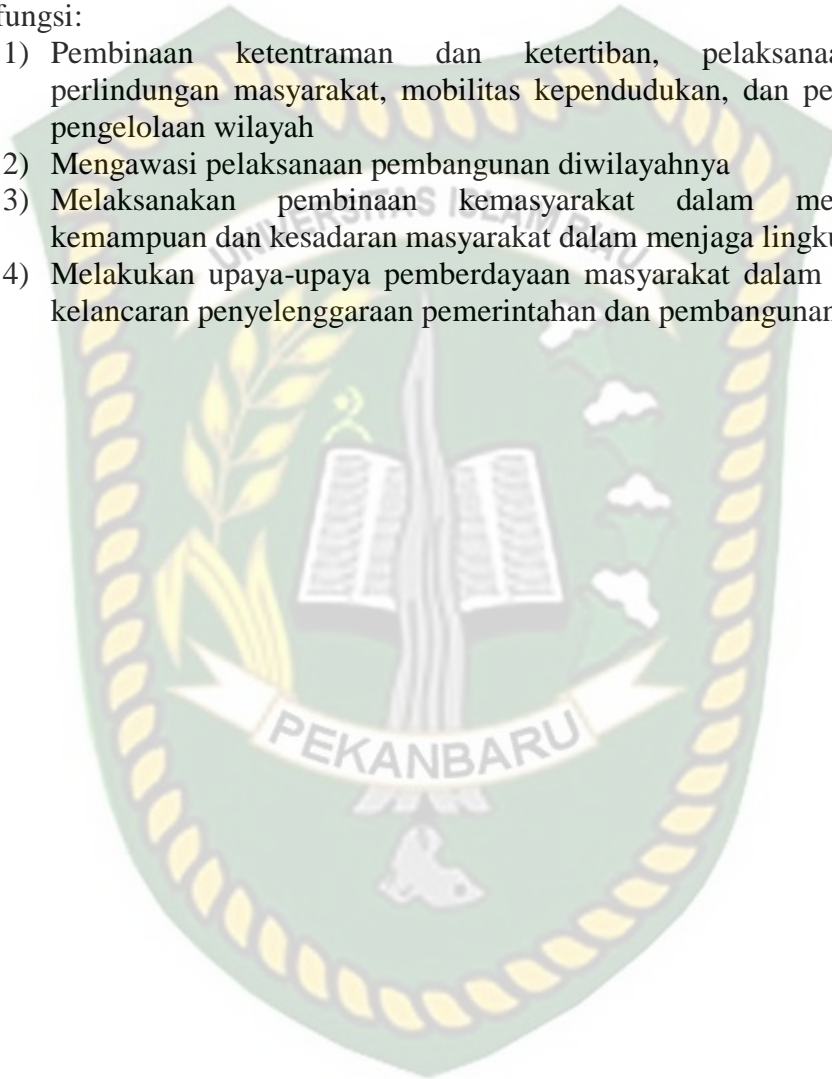
- a. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staff sekretariat
- b. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah
- c. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
 - 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
 - 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-sata dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

- a. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
- b. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional
- c. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
 - 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa
 - 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
 - 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan

Pasal 10

- a. Kepala kewilayahan/kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya
- b. Untuk melaksanakan tugas, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:
 - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
 - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
 - 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

1. Usia

Usia responden dalam penelitian ini didominasi oleh rentang usia 35 hingga 40 tahun sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel V.1 Usia Responden Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	2	3	4
1	35-40	44	47.83
2	41-45	17	18.48
3	46-50	21	22.83
4	51-55	10	10.87
Jumlah		92	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel di atas diketahui dalam penelitian ini didominasi oleh rentang usia 35 hingga 40 tahun sebanyak 44 orang responden dengan persentase 47.83%. Sementara responden yang paling sedikit dengan kisaran usia 51 tahun hingga 55 tahun dengan jumlah sebanyak 10 orang responden dengan persentase 10.87%. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang datang ke kantor Desa Simpang Padang adalah mereka yang sudah dewasa dengan rentang umur di dominasi oleh usia 35 – 40 tahun yang cenderung masih memiliki dalam usia produktif baik dalam kesehatan maupun pekerjaan sehingga sering melakukan pengurusan layanan tertentu.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel V.2 Karakteristik Responden Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Laki-laki	49	53.26
2	Perempuan	43	46.74
	Jumlah	92	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Diketahui dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 49 orang responden dengan persentase 53.26%. Sedangkan responden perempuan dengan frekuensi 43 orang responden dengan persentase 46.74%. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang datang ke kantor Desa Simpang Padang adalah berjenis kelamin laki-laki yang dalam hal ini di asumsikan adalah kepala keluarga yang sedang mengurus surat-menyurat untuk keperluan anggota keluarga mereka.

3. Pendidikan

Jenis kelamin pada penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel V.3 Pendidikan Responden Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Pasca Sarjana (S2/S3)	1	1,09
2	Perguruan Tinggi (S1)	12	13,04
3	SMA/Sederajat	45	48,91
4	SMP/Sederajat	18	19,57
5	SD/Sederajat	12	13,04
6	Tidak Tamat Sekolah	4	4,35
7	Tidak Sekolah	0	0,00
Jumlah		92	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Diketahui dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan SMA/Sederajat dengan frekuensi 45 orang responden dengan persentase 48,91%. Sedangkan responden Tidak Sekolah dengan frekuensi 0 orang responden dengan persentase 0,00%.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang datang ke kantor Desa Simpang Padang adalah SMA/Sederajat yang dalam hal ini di asumsikan adalah masyarakat yang memiliki pendidikan cenderung tidak terlalu tinggi.

B. Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa disebutkan bahwa:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam mengurus pemerintahan desa sangat diperlukannya Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa.

Pemerintahan Desa adalah pemerintahan formal dari kesatuan masyarakat Desa, pemerintahan desa memiliki kekuasaan serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintahan diatas, dimana Desa tempat segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat Desa. Keberhasilan atau kegagalan program pembangunan Desa sangat ditentukan oleh tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa uraian indikator dalam penelitian ini yaitu Pengembangan, Pemberian Reward, Motivasi, Perencanaan SDM, Kompensasi, Komunikasi sebagaimana uraian berikut:

1. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu program yang telah ada yang dalam hal ini adalah kinerja dari seorang Kepala Desa dalam mengatur pemerintahan desanya

sebagaimana tanggapan responden yang berasal dari masyarakat dari Desa Simpang Padang berikut:

Tabel V.4 Tanggapan Responden tentang Indikator Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana pengembangan yang di buat kepala desa untuk Desa Simpang Padang ?	35	45	12	92
2	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana bentuk perkembangan yang dibuat kepala desa untuk kemajuan Desa Simpang Padang ?	42	40	10	92
3	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana hasil dari pengembangan pelayanan yang terdapat di Desa Simpang Padang ?	34	43	15	92
4	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana penerimaan saran dari masyarakat terkait pengembangan pelayanan di Desa Simpang Padang?	33	36	23	92
Jumlah		144	164	60	368
Rata-rata		36 (39.13%)	41 (44.57%)	15 (16.3%)	92

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Informasi yang di dapat adalah pada indikator pengembangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin

Solapan Kabupaten Bengkalis mendapatkan jumlah tanggapan responden Baik sebanyak 36 orang responden atau dengan persentase 39.13% disusul dengan tanggapan responden cukup baik dengan jumlah responden 41 dengan persentase 44.57% sedangkan pada tanggapan responden kurang baik dengan tanggapan responden sebanyak 15 orang responden dengan persentase 16.3%.

Selain dari hasil sebaran kuesioner peneliti juga melakukan wawancara kepada informan yang memiliki wewenang seperti kutipan berikut:

“Saya sebagai kepala desa saya buat yang namanya 7 budaya pelayanan tata tertib tamu dikantor yang akan kami capai untuk perkembangan desa Simpang Padang ya khususnya untuk pelayanan ke masyarakat” (Wawancara dengan Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2020).

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dalam melakukan pengembangan pelayanan dilakukan dengan membuat 7 Budaya Pelayanan Tata Tertib Tamu dikantor yang termuat didalam Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2017 sebagaimana uraian berikut:

- a. Senyum sapa salam senang sopan sabar
- b. Tamu wajib berpakaian sopan dan tidak diperkenankan memakai sandal
- c. Tamu wajib mengisi buku tamu yang telah di sediakan
- d. Tamu wajib konfirmasi tentang keperluan kepada petugas jaga
- e. Silahkan harap menunggu di ruang tamu yang telah disediakan
- f. Membuang sampah di tempat sampah yang telah di sediakan

- g. Bertutur sapa yang sopan dan baik

Sedangkan menurut Sekretaris Desa Simpang Padang bahwa kepala desa tidak begitu membuat pengembangan yang mencolok sebagaimana kutipan berikut:

“Tidak begitu nampak sih tapi dalam masa pandemi ini memang ada perubahan misalnya ada standar kesehatan jadi ya mengikuti moment yang ada” (Wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 19 Oktober 2020)

Berdasarkan kutipan di atas diketahui tidak ada pengembangan yang mencolok karena hanya mengikuti alur pekerjaan yang sudah ada dari kepala desa terdahulu namun saat pandemi covid-19 memang ada perubahan yang terjadi yaitu adanya layanan dengan standar kesehatan misalkan dengan adanya tempat cuci tangan dan adanya pengecekan suhu kepada masyarakat yang datang ke kantor desa.

2. Pemberian Reward

Dari tanggapan responden tentang pemberian reward penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang berasal dari masyarakat Desa Simpang Padang berikut ini:

Tabel V.5 Tanggapan Responden tentang Indikator Pemberian Reward Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus surat-menyurat	32	45	15	92

	bagaimana kenaikan gaji, insentif dan promosi yang diberikan kepala desa kepada pegawai Desa Simpang Padang ?				
2	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana syarat untuk mendapatkan kenaikan gaji, insentif dan promosi di Desa Simpang Padang?	39	44	9	92
3	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana kesesuaian reward dengan kinerja pelayanan di Desa Simpang Padang?	43	43	6	92
Jumlah		114	132	30	276
Rata-rata		38 (41.3%)	44 (47.83%)	10 (10.87%)	92 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel di atas didapat informasi bahwa tanggapan responden pada kategori baik sebanyak 38 orang responden dengan persentase 41.3% kemudian pada kategori cukup baik dengan jumlah responden 44 orang responden dengan persentase 47.83% kemudian pada kategori kurang baik dengan jumlah responden 10 orang responden dengan persentase 10.87%.

Hal di atas didukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informasi sebagaimana kutipan berikut:

“Kalau reward dalam berupa uang ya jarang tapi biasanya reward atas pencapaian pegawai kantor kepala desa ya biasanya saya bawa makan keluar atau misalnya kami pergi liburan atau berwisata ke objek wisata” (Wawancara dengan Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2020)

Berdasarkan kutipan di atas diketahui adanya bentuk reward yang diberikan oleh kepala desa kepada pegawai kantor kepala desa yang dalam

hal ini berupa insentif ataupun dalam bentuk makan bersama atau melakukan kunjungan wisata jika telah menyelesaikan sebuah proyek di desa yang dalam kategori besar.

Pemberian reward pada Desa Simpang Padang juga dalam bentuk bonus jika staff kantor Desa Simpang Padang mengemban suatu jabatan pada sebuah proyek atau kegiatan sebagaimana Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis berikut:

Pasal 6

- c. Kepala Desa sebagai penguasa pengelolaan keuangan desa dan sebagai pengguna anggaran desa mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1.500.000,00
- d. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai PTPKD mendapat tunjangan sebagai berikut:
 1. Koordinator Rp 1.000.000,00
 2. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Rp 750.000,00
 3. Bendahara Desa Rp 1.250.000,00

Pasal 7

Tunjangan rapat dengan ketentuan untuk pembuatan 1 (satu) peraturan desa paling banyak:

4. Ketua Rp 750.000,00
5. Wakil Ketua Rp 650.000,00
6. Anggota Rp 450.000,00

Dari hasil pengamatan di lapangan di ketahui bahwa reward di Desa Simpang Padang di berikan dari kepala desa kepada para pegawai kantor Desa Simpang Padang yang memiliki pencapaian tertentu atas kinerjanya atau misalkan adanya penyelesaian proyek yang selesai sebelum waktu di tentukan. Sehingga untuk memberikan apresiasi kepada pada pegawai Desa

Simpang Padang maka kepala Desa Simpang Padang memberikan reward dalam berbagai bentuk kepada para pegawai kantor Desa Simpang Padang.

3. Motivasi

Dilihat dari tanggapan responden tentang motivasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang berasal dari masyarakat Desa Simpang Padang berikut ini:

Tabel V.6 Tanggapan Responden tentang Indikator Motivasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana motivasi yang diberikan kepala desa kepada pegawai Desa Simpang Padang?	24	52	16	92
2	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana bentuk motivasi dari kepala desa kepada pegawai Desa Simpang Padang ?	30	46	16	92
3	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana peningkatan kinerja pelayanan di Desa Simpang Padang?	21	52	19	92
Jumlah		75	150	51	276
Rata-rata		25 (27.17%)	50 (54.35%)	17 (18.48%)	92 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel di atas didapat informasi bahwa tanggapan motivasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada kategori baik sebanyak 25 orang responden dengan persentase 27.17% kemudian pada kategori cukup baik dengan jumlah responden 50 orang responden dengan persentase 54.35% kemudian pada kategori kurang baik dengan jumlah responden 17 orang responden dengan persentase 18.48%.

Hal di atas didukung oleh wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informasi sebagaimana kutipan berikut:

“Bentuk motivasinya iming-iming insentif atau reward makan-makan atau jalan jalan kalau proyek sudah selesai” (Wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 19 Oktober 2020)

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwa bentuk motivasi yang diberikan kepala desa kepada para pegawainya dalam menunjang pelayanan baik adalah dengan memberikan iming-iming insentif dan reward. Dalam hal ini dilakukan untuk memberikan semangat kerja dan penyeleaikan kerja yang baik dan lebih cepat.

Bentuk lain dari motivasi yang diberikan oleh pemerintah Desa Simpang Padang yaitu dalam bentuk pembinaan atau pelatihan sebagaimana Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2017 berikut:

- a. Tata cara penyusunan administrasi desa
- b. Proses pengelolaan keuangan
- c. Petunjuk teknis yang dilaksanakan di desa

- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa
- e. Memfasilitasi penyusunan administrasi desa

Dalam kaitannya materi pembinaan bagi Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang dalam hal ini adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.7 Pembinaan Pemerintahan desa kepada perangkat desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Materi	Jam Pelajaran (JP)
1	Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur	(2JP)
2	Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat	(2JP)
3	Kebijakan Umum Kepegawaian	(2JP)
4	MTSL	(3JP)
5	- Dinamika Kelompok - Wawasan Kebangsaan	- (6 JP) - (6JP)
6	Percepatan Pemberantasan Korupsi	(12 JP)
7	Pola Pikir sebagai pelayanan masyarakat	(24JP)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa materi pembinaan bagi Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam hal ini adalah perangkat desa yang terdiri dari Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur, Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat, Kebijakan Umum Kepegawaian, MTSL, Dinamika Kelompok, Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pola Pikir sebagai pelayanan masyarakat

4. Perencanaan SDM

Dilihat dari tanggapan responden tentang perencanaan sdm penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang berasal dari masyarakat Desa Simpang Padang berikut ini:

Tabel V.8 Tanggapan Responden tentang Indikator Perencanaan SDM Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana bentuk kebijakan kepala desa terhadap sumber daya manusia yang ada di kantor Desa Simpang Padang?	31	50	11	92
2	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana keadaan sumber daya manusia kantor Desa Simpang Padang ?	29	53	10	92
3	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana penerimaan sumber daya manusia terkait dengan pelayanan di kantor Desa Simpang Padang ?	40	44	8	92
4	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana kesinambungan sumber daya manusia terhadap pelayanan di kantor Desa Simpang Padang ?	28	49	15	92

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
	Jumlah	128	196	44	276
	Rata-rata	32 (34.78%)	49 (53.26%)	11 (11.96%)	92 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel di atas didapat informasi bahwa pada indikator perencanaan sdm penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada kategori baik sebanyak 32 orang responden dengan persentase 34.78% kemudian pada kategori cukup baik dengan jumlah responden 49 orang responden dengan persentase 53.26% kemudian pada kategori kurang baik dengan jumlah responden 11 orang responden dengan persentase 11.96%.

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden tentang indikator perencanaan sdm penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang berasal dari masyarakat Desa Simpang Padang berikut ini:

“Kebijakannya ya saya ambil pegawai yang memang tidak semua sarjana tapi punya keahlian minimal bisa mengoperasikan komputer dengan baik” (Wawancara dengan Kepala Desa tanggal 19 Oktober 2020)

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwa sumber daya manusia yang dimiliki kantor desa Simpang Padang dalam menunjang memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat adalah dengan memilih pegawai yang memiliki keahlian khususnya komputer meskipun tidak semua pegawai yang memiliki latar belakang sarjana atau sederajat.

Dalam melakukan penjaringan sumber daya manusia pada Desa Simpang Padang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk memenuhi persyaratan khusus memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c bagi calon perangkat desa yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian dibidang komputer pengujian khusus oleh tim penjaringan dan penyaringan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Tim penjaringan dan penyaringan menunjuk seseorang baik itu berasal dari perangkat atau staf desa atau dapat jug aberasal dari luar perangkat atau staf desa yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang komputer sebagai tenaga penguji;
- b. Calon perangkat desa yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian komputer pada saat mendaftar langsung dilakukan pengujian terhadap kemampuan mengoperasikan komputer oleh orang yang telah ditujuk tim penjaringan dan penyaringan
- c. Pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa kemampuan mulai dari menghidupkan, menggunakan sampai dengan mematikan komputer;
- d. Pengujian kemampuan menggunakan komputer sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk kemampuan mengetik dan mencetak lembaran kerja yang disiapkan tenaga penguji sesuai standar format yang ditentukan; dan
- e. hasil pengujian berupa surat keterangan yang berisi tentang kemampuan dari calon perangkat desa yang ditanda-tangani oleh tenaga penguji diketahui oleh ketua tim penjaringan dan penyaringan.

Dari peraturan di atas diketahui bahwa jika masyarakat ingin menjadi salah satu perangkat desa Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis maka harus memenuhi kriteria yang telah di tentukan diantaranya adalah memiliki kemampuan mengoperasikan computer. Sementara jika tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian dibidang komputer pengujian khusus oleh tim penjaringan dan penyaringan oleh

pihak desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

5. Kompensasi

Kompensasi adalah Imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden tentang kompensasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang berasal dari masyarakat Desa Simpang Padang berikut ini:

Tabel V.9 Tanggapan Responden tentang Indikator Kompensasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana kesesuaian kompensasi dengan kinerja di kantor Desa Simpang Padang ?	43	45	4	92
2	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana bentuk kompensasi dari Desa Simpang Padang?	29	45	4	92
Jumlah		72	96	16	182
Rata-rata		36	48	8	92

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
		(39.13%)	(52.17%)	(8.70%)	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel di atas didapat informasi bahwa pada indikator kompensasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada kategori baik sebanyak 36 orang responden dengan persentase 39.13% kemudian pada kategori cukup baik dengan jumlah responden 48 orang responden dengan persentase 52.17% kemudian pada kategori kurang baik dengan jumlah responden 8 orang responden dengan persentase 8.70%.

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden tentang indikator kompensasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang berasal dari masyarakat Desa Simpang Padang berikut ini:

“Ya pernah mengajukan naik gaji supaya kami bisa tambah semangat kerja tapi belum di ACC kepala desa tapi lebih ke insentif kalau proyek. Karena jika ada proyek apalagi besar kami biasanya dapat upah capek kalau kepala desa dulu jarang” (Wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 19 Oktober 2020)

Berdasarkan kutipan di atas diketahui adanya keengganan dari kepala desa untuk menaikkan gaji pegawainya meskipun telah dilakukan pengajuan kenaikan gaji dalam menunjang pemberian semangat kepada pegawai. Namun disisi lain kepala desa lebih memilih memberikan insentif setiap adanya proyek yang dilakukan di desa Simpang Padang yang mereka

memberi istilah dengan “upah capek”. Sehingga inilah bentuk kompensasi lain yang diberikan kepada pegawai guna memberikan semangat agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Kompensasi yang diterima oleh pegawai Desa Simpang Padang telah di atur dan tertuang didalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis sebagaimana tabel berikut:

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi kepala desa dan perangkat desa terdiri dari:

- e. Penghasilan tetap;
- f. Tunjangan; dan
- g. Penerimaan lain yang sah.

Pasal 4

(2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Rp 4.500.000,00
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan; dan
- c. perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan;
- d. kepala dusun sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan;

Pasal 5

(3) Tunjangan beban kerja bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan dengan besaran paling banyak sebagai berikut”

- a. Kepala Desa Rp 1.000.000,00
- b. Sekretaris Desa Rp 750.000,00
- c. Perangkat Desa selain sekretaris desa Rp 500.000,00

Pasal 6

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah

6. Komunikasi

Pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan), pikiran dapat berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain, yang muncul dari benaknya perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kamarahan, keberanian, kegairahan, dan lain sebagainya yang timbul dari lubuk hati.

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden tentang komunikasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang berasal dari masyarakat Desa Simpang Padang berikut ini:

Tabel V.10 Tanggapan Responden tentang Indikator Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Item Penilaian	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana bentuk komunikasi kepada pegawainya dan masyarakat?	25	45	22	92
2	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana bentuk komunikasi yang dibangun di Desa Simpang Padang?	17	57	18	92
3	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat bagaimana kemudahan pelayanan berdasarkan komunikasi yang ada	33	47	12	92

	di Desa Simpang Padang?				
4	Menurut Bapak atau Ibu sebagai masyarakat yang mengurus pengurusan surat-menyurat adakah penyelewengan komunikasi terkait pelayanan berdasarkan komunikasi yang ada di Desa Simpang Padang?	29	55	8	92
Jumlah		104	204	60	368
Rata-rata		26 (28.26%)	51 (55.43%)	15 (16.3%)	92 100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel di atas didapat informasi bahwa pada indikator komunikasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis pada kategori baik sebanyak 26 orang responden dengan persentase 28.26% kemudian pada kategori cukup baik dengan jumlah responden 51 orang responden dengan persentase 55.43% kemudian pada kategori kurang baik dengan jumlah responden 15 orang responden dengan persentase 16.3%.

Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden tentang indikator komunikasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang berasal dari masyarakat Desa Simpang Padang berikut ini:

“Sejak dengan bapak kepala desa yang baru ini kami ada sistem grup WA isinya grup yang isinya pegawai kantor desa saja dan grup WA yang isinya pegawai kantor kepala desa dan BPD jadi kalau ada informasi jadi lebih cepat menyebar” (Wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 19 Oktober 2020)

Berdasarkan kutipan di atas adanya hal menarik dari pelayanan di kantor desa Simpang Padang yaitu adanya gagasan oleh kepala desa dalam membuat grup media sosial yang dalam hal ini adalah *WhatsApp* yang terdiri

dari kepala desa dan pegawai serta grup *WhatsApp* yang terdiri dari Kepala Desa, Pegawai kantor desa dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) guna memberikan kedekatan secara emosional dan percepatan penyebaran informasi dan juga mencegah adanya ketidaktrasparansi kebijakan yang ada di Desa Simpang Padang.

Komunikasi dalam pemerintah Desa Simpang Padang juga dapat dilihat dari jadwal kegiatan Desa Simpang Padang sebagai berikut:

Tabel V.11 Jadwal Kegiatan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Program	Kegiatan
1	Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat 2. Kegiatan operasional pemerintahan desa 3. Kegiatan tunjangan dan oprasional BPD 4. Kegiatan oprasional RT dan RW 5. Kegiatan pengadaan peralatan kantor 6. Kegiatan pendataan potensi desa (Propil desa dan monografi desa) 7. Kegiatan pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes 8. Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa 9. Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) 10. Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah Desa 11. Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan Desa
2	Program Kerja Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pembangunan Gedung TK 2. Kegiatan Pembangunan Pagar Gedung TK Dan MI 3. Kegiatan Pembangunan Pagar Gedung PAUD 4. Kegiatan Peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA) 5. Kegiatan Pengadaan Mesin Pompa dan Instalasinya 6. Kegiatan Pembangunan Pos Keamanan Desa 7. Kegiatan Pembangunan jalan lingkungan, pavingisasi 8. Kegiatan Pembangunan Jembatan/Gorong-gorong lingkungan 9. Kegiatan Pembangunan Talang Air Saluran irigasi

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Karanganyar 11. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalanKrajan 12. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Karangasem 13. Kegiatan Pembangunan saluran air hujan/drainase 14. Kegiatan Pembangunan Lapangan Volley 15. Kegiatan Pembangunan pagar makam 16. Kegiatan Pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios)
3	Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Operasional LPMD 2. Kegiatan Operasional PKK 3. Kegiatan Operasional Karang Taruna 4. Kegiatan Operasional Posyandu 5. Kegiatan Operasional Pokja Penanggulangan Kemiskinan 6. Kegiatan Pelatihan Linmas dan TAGANA 7. Kegiatan sedekah bumi (manganan) 8. Kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN) 9. Kegiatan peringatan hari besar Keagamaan (PHBK) 10. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong (BBGR)
4	Program Kerja Pemberdayaan MasyarakatDesa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) 2. Kegiatan fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bagi kader Posyandu 3. Kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa 4. Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi kelompok perempuan 5. Kegiatan Pelatihan Teknis Usaha Perikanan 6. Kegiatan Peningkatan peran tim KB desa 7. Kegiatan Fasilitasi peningkatan capaian KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 8. Kegiatan Peningkatan kegiatan bina keluarga balita (BKB) 9. Kegiatan Peningkatan kegiatan bina keluarga Lansia (BKL)

Sumber: Arsip Desa Simpang Padang, 2020

C. Pembahasan

Secara keseluruhan diketahui bahwa tanggapan responden didominasi oleh jawaban dengan kategori Baik sebagaimana informasi yang diberikan pada tabel berikut:

Tabel V.12 Rekapitulasi tanggapan responden tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	Tanggapan Responden			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan	36 (39.13%)	41 (44.57%)	15 (16.3%)	92 100%
2	Pemberian Reward	38 (41.3%)	44 (47.83%)	10 (10.87%)	92 100%
3	Motivasi	25 (27.17%)	50 (54.35%)	17 (18.48%)	92 100%
4	Perencanaan SDM	32 (34.78%)	49 (53.26%)	11 (11.96%)	92 100%
5	Kompensasi	36 (39.13%)	48 (52.17%)	8 (8.70%)	92 100%
6	Komunikasi	26 (28.26%)	51 (55.43%)	15 (16.3%)	92 100%
Jumlah		193	283	76	92 100%
Rata-rata		32 (34.78%)	47 (51.09%)	13 (14.13%)	

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dari segi evaluasi pada tanggapan responden Baik dengan jumlah responden 32 dengan persentase 34.78%, pada tanggapan responden cukup baik dengan tanggapan responden sebanyak 47 dengan

persentase 51.09% sedangkan pada tanggapan responden kurang baik sebanyak 13 orang responden dengan persentase 14.13%.

Secara keseluruhan diketahui bahwa tidak ada pengembangan yang mencolok karena hanya mengikuti alur pekerjaan yang sudah ada dari kepala desa terdahulu namun saat pandemi covid-19 memang ada perubahan yang terjadi yaitu adanya layanan dengan standar kesehatan misalkan dengan adanya tempat cuci tangan dan adanya pengecekan suhu kepada masyarakat yang datang ke kantor desa.

Sedangkan disisi lain adanya bentuk reward yang diberikan oleh kepala desa kepada pegawai kantor kepala desa yang dalam hal ini berupa insentif ataupun dalam bentuk makan bersama atau melakukan kunjungan wisata jika telah menyelesaikan sebuah proyek di desa yang dalam kategori besar.

Dari segi bentuk motivasi yang diberikan kepala desa kepada para pegawainya dalam menunjang pelayanan baik adalah dengan memberikan iming-iming insentif dan reward. Dalam hal ini dilakukan untuk memberikan semangat kerja dan penyeleaikan kerja yang baik dan lebih cepat.

Sedangkan sumber daya manusia yang dimiliki kantor desa Simpang Padang dalam menunjang memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat adalah dengan memilih pegawai yang memiliki keahlian khususnya komputer meskipun tidak semua pegawai yang memiliki latar belakang sarjana atau sederajat.

Akan tetapi adanya keengganan dari kepala desa untuk menaikkan gaji pegawainya meskipun telah dilakukan pengajuan kenaikan gaji dalam menunjang pemberian semangat kepada pegawai. Namum disisi lain kepala desa lebih

memilih memberikan insentif setiap adanya proyek yang dilakukan di desa Simpang Padang yang mereka memberi istilah dengan “upah capek”. Sehingga inilah bentuk kompensasi lain yang diberikan kepada pegawai guna memberikan semangat agar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Adanya hal menarik dari pelayanan di kantor desa Simpang Padang yaitu adanya gagasan oleh kepala desa dalam membuat grup media sosial yang dalam hal ini adalah WhatsApp yang terdiri dari kepala desa dan pegawai serta grup WhatsApp yang terdiri dari Kepala Desa, Pegawai kantor desa dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) guna memberikan kedekatan secara emosional dan percepatan penyebaran informasi dan juga mencegah adanya ketidaktrasparansi kebijakan yang ada di Desa Simpang Padang diperoleh hasilnya sebagai berikut.

Tabel V.13 Data Sekunder Penelitian tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	Penemuan	Sumber
1	Pengembangan	Membuat 7 Budaya Pelayanan Tata Tertib Tamu dikantor	Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2017
2	Pemberian Reward	Pemberian Honirium sebuah proyek atau kegiatan	Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis
3	Motivasi	Pembinaan atau Pelatihan	Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2017
4	Perencanaan SDM	Harus memiliki keahlian komputer	Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pengangkatan dan

No	Indikator	Penemuan	Sumber
			Pemberhentian Perangkat
5	Kompensasi	Kompensasi pemerintah desa terdiri dari 3 aspek: a. Penghasilan tetap; b. Tunjangan; dan c. Penerimaan lain yang sah	Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis
6	Komunikasi	Program-Program Desa Simpang Padang	Arsip Desa Simpang Padang

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa ada beberapa data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian yang tersebar dalam beberapa indikator.

Pada indikator pengembangan diketahui bahwa dalam melakukan pengembangan pelayanan dilakukan dengan membuat 7 Budaya Pelayanan Tata Tertib Tamu dikantor yang termuat didalam Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2017 sebagaimana uraian berikut:

- a. Senyum sapa salam senang sopan sabar
- b. Tamu wajib berpakaian sopan dan tidak diperkenankan memakai sandal
- c. Tamu wajib mengisi buku tamu yang telah di sediakan
- d. Tamu wajib konfirmasi tentang keperluan kepada petugas jaga
- e. Silahkan harap menunggu di ruang tamu yang telah disediakan
- f. Membuang sampah di tempat sampah yang telah di sediakan
- g. Bertutur sapa yang sopan dan baik

Berdasarkan peraturan di atas diketahui bahwa Desa Simpang Padang memberikan pelayanan yang memuaskan yang terlihat dari aturan yang diberlakukan saat masyarakat atau tamu yang datang ke Desa Simpang Padang.

Jika dilihat dari indikator pemberian reward pada Desa Simpang Padang juga dalam bentuk bonus jika staff kantor Desa Simpang Padang mengemban suatu jabatan pada sebuah proyek atau kegiatan sebagaimana Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis berikut:

Pasal 6

- a. Kepala Desa sebagai penguasa pengelolaan keuangan desa dan sebagai pengguna anggaran desa mnedapayakan tunjangan sebesar Rp 1.500.000,00
- b. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai PTPKD mendapat tunjangan sebagai berikut:
 1. Koordinator Rp 1.000.000,00
 2. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Rp 750.000,00
 3. Bendahara Desa Rp 1.250.000,00

Pasal 7

Tunjangan rapat dengan ketentuan untuk pembuatan 1 (satu) peraturan desa paling banyak:

1. Ketua Rp 750.000,00
2. Wakil Ketua Rp 650.000,00
3. Anggota Rp 450.000,00

Sedangkan dari sisi motivasi diketahui bahwa bentuk lain dari motivasi yang diberikan oleh pemerintah Desa Simpang Padang yaitu dalam bentuk pembinaan atau pelatihan sebagaimana Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2017 berikut:

- a. Tata cara penyusunan administrasi desa
- b. Proses pengelolaan keuangan

- c. Petunjuk teknis yang dilaksanakan di desa
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa
- e. Memfasilitasi penyusunan administrasi desa

Selain itu dilihat dari indikator motivasi diketahui bahwa dalam melakukan penjaringan sumber daya manusia pada Desa Simpang Padang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk memenuhi persyaratan khusus memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c bagi calon perangkat desa yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian dibidang komputer pengujian khusus oleh tim penjaringan dan penyaringan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Tim penjaringan dan penyaringan menunjuk seseorang baik itu berasal dari perangkat atau staf desa atau dapat jug aberasal dari luar perangkat atau staf desa yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang komputer sebagai tenaga penguji;
- b. Calon perangkat desa yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian komputer pada saat mendaftar langsung dilakukan pengujian terhadap kemampuan mengoperasikan komputer oleh orang yang telah ditunjuk tim penjaringan dan penyaringan
- c. Pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa kemampuan mulai dari menghidupkan, menggunakan sampai dengan mematikan komputer;
- d. Pengujian kemampuan menggunakan komputer sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk kemampuan mengetik dan mencetak lembaran kerja yang disiapkan tenaga penguji sesuai standar format yang ditentukan; dan
- e. Hasil pengujian berupa surat keterangan yang berisi tentang kemapuan dari calon perangkat desa yang ditanda-tangani oleh tenaga penguji diketahui oleh ketua tim penjaringan dan penyaringan.

Dari indikator kompensasi yang diterima oleh pegawai Desa Simpang Padang telah di atur dan tertuang didalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis sebagaimana tabel berikut:

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi kepala desa dan perangkat desa terdiri dari:

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Pasal 4

(2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Rp 4.500.000,00
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan; dan
- c. perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan;
- d. kepala dusun sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan;

Pasal 5

(3) Tunjangan beban kerja bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan dengan besaran paling banyak sebagai berikut”

- a. Kepala Desa Rp 1.000.000,00
- b. Sekretaris Desa Rp 750.000,00
- c. Perangkat Desa selain sekretaris desa Rp 500.000,00

Pasal 6

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah

Sedangkan dari sisi indikator komunikasi dalam pemerintah Desa Simpang Padang juga dapat dilihat dari jadwal kegiatan Desa Simpang Padang sebagai berikut:

Tabel V.14 Jadwal Kegiatan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Program	Kegiatan
1	Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat 2. Kegiatan operasional pemerintahan desa 3. Kegiatan tunjangan dan oprasional BPD 4. Kegiatan oprasional RT dan RW 5. Kegiatan pengadaan peralatan kantor 6. Kegiatan pendataan potensi desa (Propil desa dan

No	Program	Kegiatan
		monografi desa) 7. Kegiatan pembahasan RAPBDes dan penetapan APBDes 8. Kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa 9. Kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) 10. Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah Desa 11. Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan Desa
2	Program Kerja Pembangunan Desa	1. Kegiatan Pembangunan Gedung TK 2. Kegiatan Pembangunan Pagar Gedung TK Dan MI 3. Kegiatan Pembangunan Pagar Gedung PAUD 4. Kegiatan Peningkatan penyelenggaraan pendidikan di desa (PAUD, TK, Diniyah dan RA) 5. Kegiatan Pengadaan Mesin Pompa dan Instalasinya 6. Kegiatan Pembangunan Pos Keamanan Desa 7. Kegiatan Pembangunan jalan lingkungan, pavingisasi 8. Kegiatan Pembangunan Jembatan/Gorong-gorong lingkungan 9. Kegiatan Pembangunan Talang Air Saluran irigasi 10. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Karanganyar 11. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Krajan 12. Kegiatan Pembangunan tembok penahan jalan Karangasem 13. Kegiatan Pembangunan saluran air hujan/drainase 14. Kegiatan Pembangunan Lapangan Volley 15. Kegiatan Pembangunan pagar makam 16. Kegiatan Pengembangan prasarana BUMDes (gedung kantor, gudang, kios)
3	Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1. Kegiatan Operasional LPMD 2. Kegiatan Operasional PKK 3. Kegiatan Operasional Karang Taruna 4. Kegiatan Operasional Posyandu 5. Kegiatan Operasional Pokja Penanggulangan Kemiskinan 6. Kegiatan Pelatihan Linmas dan TAGANA 7. Kegiatan sedekah bumi (manganan) 8. Kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN) 9. Kegiatan peringatan hari besar Keagamaan (PHBK) 10. Kegiatan Pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong (BBGR)
4	Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) 2. Kegiatan fasilitasi kegiatan pelatihan dan bimbingan

No	Program	Kegiatan
		teknis bagi kader Posyandu 3. Kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa 4. Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi kelompok perempuan 5. Kegiatan Pelatihan Teknis Usaha Perikanan 6. Kegiatan Peningkatan peran tim KB desa 7. Kegiatan Fasilitasi peningkatan capaian KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 8. Kegiatan Peningkatan kegiatan bina keluarga balita (BKB) 9. Kegiatan Peningkatan kegiatan bina keluarga Lansia (BKL)

Sumber: Arsip Desa Simpang Padang, 2020

Jika dilihat dari banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan di Desa Simpang Padang maka diketahui bahwa seringnya komunikasi dilakukan baik dari sisi antar pemerintah Desa Simpang Padang maupun dari sisi masyarakat kepada pemerintah Desa Simpang Padang. Semakin banyak kegiatan dilakukan maka semakin baik pula komunikasi yang dibangun.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Kinerja Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis diketahui bahwa pada kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dari segi evaluasi pada tanggapan responden cukup baik dengan tanggapan responden sebanyak 47 dengan persentase 51.09%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kepada masyarakat sebaiknya bekerja sama dalam menaati aturan yang telah di buat oleh kepala desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Dharma, Surya. 2009. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan. Penerapannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fariied, Ali. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi: dari Pemikiran Paradigmatik menuju Redefinisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Feriyanto, Endang Shyta Triana 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Tamanwinagun : Mediaterra
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : penerbit Erlangga
- Hasibuan, Malayu S.P 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi. Aksara: Jakarta.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Lubis, Aderina. 2007, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam pengambilan keputusan pembelian Sepeda Motor Merek Honda di Kota Medan, Program Magister Ilmu Manajemen, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Manajemen Sumber daya Manusia. Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Manullang. 1999. *Manajemen Personalialia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Marnis ,Edy. 2011. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: PT. Panca Abdi Nugram
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik* : Bandung : Alfabeta
- Safroni, 2012, *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks. Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Aditya Media

- Saparin, 2009: *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, P. Sondang, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara
- Siagian, Sondang., P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pranada Media Group
- Syafiie, Kencana Inu 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Askara
- Syafiie, Kencana Inu 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syafiie, Kencana Inu 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Administrasi Publik*. Jatinangor. Erlangga
- Tahir, Arifin 2015. *Kebijakan publik dan Transparansi*. Bandung : Alfa beta
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada
- Winardi, 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.

Yussa, Hendry Andry 2015. *Prilaku dan Etika Administrasi publik*. Pekanbaru : Marpoyan tujuh publishing

Zulkifli dan Moris A. Yogya, 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press

Zulkifli, Arif. 2014. *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknik

Dokumentasi :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis

Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis No 3 Tahun 2017

Lampiran 12



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674634 Email. fsipol@uir.ac.id Website. www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI
Nomor: 1415/A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :


Nama : Nadyatul Jannah
Npm : 157110069
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
Persentase Plagiasi : 25 % (97 Halaman)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Mei 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

Lampiran 13

Daftar Peraturan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Nomor Peraturan Desa	Tentang
1	Nomor 03 Tahun 2017	Susunan Tataan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simpang Padang
2	Nomor 03 Tahun 2018	Standarisasi Perjalanan Dinas Perangkat Desa, Bpd, Kelembagaan-Kelembagaan Serta Aparat Pemerintah Desa Simpang Padang
3	Nomor 04 Tahun 2018	Pengeluaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT/RW, Honorium, Upah Tenaga Kerja Dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	Nomor 05 Tahun 2018	Pedoman Pendataan Dan Penetapan Masyarakat Miskin, Pengangguran, Setengah Pengangguran Dan Stunting (Penduduk Yang Memiliki Balita Bermasalah Gizi) Di Desa Simpang Padang